

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Dari Media



BPK Perwakilan  
Provinsi Gorontalo

Tanggal

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

Tahun

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|

Harian Umum

Online

Provinsi Gorontalo

## Temuan BPK RI, Belanja Covid 19 Tak Sesuai Ketentuan

19/12/2020



GORONTALO (RGOL.ID) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada seluruh pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo, terkait dengan temuan penanganan covid di Gorontalo.

Untuk itu BPK memberikan tengat waktu selama 60 hari ke depan untuk menindaklanjuti sejumlah temuan tersebut, sesuai pasal 20 ayat (3) UU NO. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II Tahun 2020, ada sejumlah temuan. Antara lain, adalah penyediaan jejaring laboratorium dalam rangka penemuan kasus Covid19.

Pengambilan dan pengiriman specimen, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo belum memadai,” ujar Kepala Perwakilan BPK RI untuk Gorontalo Dwi Sabardiana dalam sambutannya, saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester II 2020, yang berlangsung di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI di Gorontalo Jumat 15.00 Wita kemarin.

Temuan lainnya kata Dwi Sabardiana adalah Pemprov dan Pemerintah Kota dan Kabupaten Gorontalo belum secara aktif dan memadai mengendalikan pandemi Covid19, serta belum menggunakan managemen klinis dalam mengendalikan pandemi Covid19.



Foto : Caption : Dwi Sabardiana Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Penyerahan LHT , BPK RI untuk Pemda Bonbol saat berlangsung di Auditorium BPK RI Jumat (18/12) kemarin. Foto (riel/rg)

Yang disoroti BPK juga adalah penerbitan regulasi terkait penerapan disiplin protocol kesehatan yang dilakukan Pemprov dan belum didukung petunjuk pelaksanaan yang jelas.

“Pemerintah Kota dan Kabupaten Gorontalo belum memanfaatkan promosi protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan covid19 akibatnya belum semua masyarakat memahaminya”, kata Dwi Sabardiana lagi.

Temuan lainnya adalah rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan covid19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta sebagian hasil refocusing dan realokasi anggaran dialokasikan untuk belanja yang tidak berkaitan dengan penanganan covid19.

Pengadaan bahan kebutuhan pokok pada kegiatan pasar kebutuhan pokok bersubsidi tahun 2020 yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan belum sesuai ketentuan.

Verifikasi dan validasi data penerimaan serta pengelolaan bantuan langsung pangan daerah atau BLPD belum memadai. Serta rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan covid19 tidak sesuai ketentuan.

Selain itu ditemukan realisasi belanja modal alat kesehatan di RSUD Toto Kabila yang termasuk dalam refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid19 belum maksimal untuk penanganan covid19.

LHP hasil pemeriksaan semester II Tahun 2020 oleh BPK RI diserahkan langsung kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato.

Diluar belanja penanganan covid19 BPK menemukan 3 hal belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal tahun anggaran 2020 Januari – Oktober, pada pemerintah Provinsi Gorontalo ditemukan permasalahan.

Tiga hal tersebut, seperti diungkapkan oleh Kepala BPK RI Dwi Sabardiana, permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemprov adalah pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai kondisi senyatanya pada 19 organisasi perangkat daerah sebesar Rp580,72 juta.

Dan kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan penyediaan rumah hunian layak bagi masyarakat miskin Rp179,72 Juta.

Serta kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruangan dan dinas perikanan dan kelautan Rp487/57 juta.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas pengelolaan SPBE menunjukkan adanya permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas pemerintah tahun anggaran 2019/2020 (semester I) pada pemerintah kabupaten pohuwato dan instansi terkait lainnya di Marisa.

Permasalahan tersebut antara lain belum sepenuhnya menyediakan jaringan intra pemerintah yang memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE. Belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE dan belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara terencana dan periodik (riel/rg).

Sumber:

<https://rgol.id/temuan-bpk-ribelanja-covid-19-tak-sesuai-ketentuan/>